

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih tetap menjadi tulang punggung keuangan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank demi menunjang perannya sebagai tulang punggung keuangan di Indonesia ialah memberikan kredit. Didalam pemberian kredit, bank tidak hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat (Suyatno,1992:16).

Sebagaimana diketahui fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, berhubungan langsung dengan dana yang dikumpulkannya dan kredit yang disalurkanannya agar mampu menyumbang dalam penciptaan pembangunan di bidang ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan .

Keberadaan bank merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan apalagi dalam pengertian investasi dan kredit. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank akan terus mengembangkan kompetensi yang lain di bidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan. Berdasarkan Undang-Undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank umum dan BPR (Siamat,2004:87), sampai dengan

tahun 2008 pembagian bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Institusi Perbankan di Indonesia

Kelompok Bank	Des07	Des08
Bank Persero	5	5
BUSN Devisa	35	32
Bank Non Devisa	36	36
Bank Pembangunan Daerah	26	26
Bank Campuran	17	15
Bank Asing	11	10
Total	130	124
Bank Perkreditan Rakyat	1817	3367
Total	1817	3367

Sumber *Indonesian Banking Statistics - Vol. 7, No. 1, December 2008*

Pentingnya perkreditan yang dilakukan oleh bank memberikan andil di dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Dimana bank menjadi salah satu tulang punggung dan sarana dalam memajukan perkembangan ekonomi, dapat dilihat dari penyaluran kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dilakukan oleh bank umum di Indonesia per Desember 2003-Desember 2008

Tabel 1.2
Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank

Kelompok Bank	Des03	Des04	Des05	Des06	Des07	Des08
1. Bank Persero	77.543	99.010	122.189	144.935	176.74	230.375
2. BPD	27.040	34.700	42.462	52.859	67.774	87.655
3. BUSN	92.605	127.438	176.421	195.326	238.211	290.508
4. Bank Asing dan Campuran	9.900	9.944	13.836	17.322	20.073	25.406
JUMLAH	207.088	271.093	354.908	410.442	502.796	633.945

Sumber *Indonesian Banking Statistics - Vol. 7, No. 1, December 2008*

Pemerintah sangat mendukung dan menggalakan atas pemberian kredit di sektor UMKM karena akan dapat meningkatkan dunia usaha di Indonesia terutama karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia bergerak di bidang usaha

sektor mikro, kecil, dan menengah (data BPS tahun 2008 jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia). Dukungan yang diberikan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan Paket Kebijakan 1990 yang mana mewajibkan setiap bank-bank persero dan swasta untuk memberikan alokasi sebesar 20% dari total kreditnya dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) (Nuryakin&Warjiyo,2006:24).

Dari prospek dunia, sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Baik di Negara maju maupun berkembang, UMKM sangat penting tidak saja karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja tetapi juga di banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDB UKM 2005-2007

Skala Usaha	2005	2006	2007
Usaha Kecil	5.82	5.50	6.18
Usaha Menengah	6.25	6.27	6.84
UKM	5.95	5.73	6.38
Usaha Besar	5.37	5.23	6.24
Total	5.69	5.51	6.32

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008

Perkembangan UMKM di Negara yang sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda di satu daerah dengan di daerah lain atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian,

ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara yang sedang berkembang. Rintangan - rintangan yang umum tersebut diantaranya keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (ku alitas SDM yang rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan ener gi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya (Tambunan,2005:7)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan modal kerja yang di berikan pihak bank. Pemberian pinjaman sangat penting bagi perekonomian, karena kegiatan ini membuka kemungkinan untuk membiayai kegiatan pertanian, perdagangan dan industri Negara (Reed&Gill,1998:4). Permodalan atau dana yang cukup menjadi modal dasar atas berjalannya usaha di bidang UMKM, hal tersebutlah yang menjadikan dasar pemerintah untuk memberikan kontribusinya di bidang UMKM, selain dapat membantu rakyatnya sendiri juga guna menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu pemberian kredit merupakan kebutuhan dasar atas terlaksananya perkembangan usaha di Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi, mendapatkan pinjaman atau kredit dari suatu bank bukan merupakan suatu hal yang mudah, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan di dalam pengajuan kredit dari masyarakat kepada bank karena terkait dengan modal yang dimiliki bank itu sendiri.

Terlebih setelah pemberlakuan PBI No. 3/2/PBI/2001 yang didalamnya menyatakan bahwa pemberian KUK oleh bank diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan tiap bank. Hal ini bertentangan dengan Paket Kebijakan 1990 dan dengan kata lain kewajiban untuk memberikan kredit sebesar 20% dari total kredit setiap bank tidaklah berlaku kembali. Atas diberlakukannya kebijakan PBI No.3/2/PBI/2001, Siregar (2004) dalam Nuryakin&Warjiyo (2006:25) melakukan analisis respon bank-bank terhadap pemberlakuan Kebijakan Bank Indonesia

2001 dengan hasil bahwa bank persero dan bank swasta merespon kebijakan tersebut dengan mengurangi penyaluran kredit kepada usaha kecil.

Menurunnya nilai tukar Rupiah yang memiliki dampak terhadap jatuhnya perusahaan-perusahaan yang secara tidak langsung juga turut berimbas terhadap likuiditas, rentabilitas dan permodalan dunia perbankan. Tak terkecuali bahwa besar atau kecilnya pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank didasarkan atas kemampuan dan ukuran Bank tersebut. Menurut *office of advocacy* yang melakukan suatu studi mengenai “*Rank and Size Description for 1996 Study*”, ukuran bank mencerminkan ukuran aktiva (*asset size*) dari institusi keuangan (Tjondro,2007:54) dan Miler dan Smith(2000) dalam Tjondro (2007:54) berpendapat bahwa bank yang berukuran besar (memiliki jumlah aktiva yang besar) mampu memberikan kredit yang lebih besar karena bank tersebut memiliki kapasitas kredit yang lebih besar.

Pemerintah memiliki peran dalam mendukung usaha dan pengusaha mikro, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan yang berpihak pada sektor UMKM. Oleh karena itu, faktor yang mendorong bank dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM ialah sebagai bentuk dukungan dan pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dalam hal tujuan pemberdayaan sektor UMKM sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(diunduh dari www.depkop.go.id). Tujuan pemberdayaan sektor UMKM berdasar UU No.20 tahun 2008 diantaranya yaitu pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; ketiga, meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain dikeluarkannya kebijakan mengenai sektor UMKM, pemerintah turut menyediakan unsur penunjang seperti *Business Development Service* (BDS) yaitu lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Unsur penunjang yang kedua yaitu, adanya lembaga penjaminan kredit seperti PT. ASKRINDO, PT.

Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia(PKPI) dan Perum Sarana Pembangunan Nasional(PSPN) yang dapat mengecilkan risiko bagi pihak bank terhadap pemberian kredit disektor UMKM. Lembaga penjaminan kredit diatas diperlukan karena sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak (*feasible*) menghadapi permasalahan dalam pemenuhan persyaratan teknis perbankan (*bankable*)(Surat Edaran No. 11/ 1 /DPNP,2009), Unsur penunjang yang ketiga adanya sistem Informasi nasabah, pelatihan teknis dan pendidikan masyarakat (Suryadharma,2005:26)

Selain mendukung pemerintah didalam hal penyaluran kredit di sektor UMKM, bank juga harus memperhatikan karakteristik internal bank itu sendiri terhadap kondisi finansialnya (Nuryakin&Warjiyo,2006:26). Menurut Agung Juda, et al.(2001:23-25) permasalahan yang sering melanda industri perbankan dalam hal penawaran kredit adalah kecukupan modal, kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Dalam kondisi NPL yang tinggi bank lebih cenderung melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki kualitas asset daripada menyalurkan kredit. Selain itu tingginya NPL juga berpengaruh terhadap memburuknya kondisi permodalan karena dipicu dari meningkatnya PPAP yang harus dibentuk serta menurunnya pendapatan bunga. Permasalahan ketiga yang melanda industri perbankan ialah risiko kredit, dimana adanya kecenderungan bank untuk hanya berhubungan dengan debitur lama; kecenderungan untuk meminta jaminan (*colaterall*) yang likuid dan adanya perubahan organisasi kredit yang memiliki kecenderungan lebih sentralistik dalam pemutusan kredit.

Selain itu ada variabel lain yang turut berperan di dalam hal penawaran kredit kepada masyarakat, menurut Perry Warjiyo(2004) dalam Meydianawathi (2007:135) kenyataannya perilaku penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), jumlah kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta menurut Suseno dan Piter A.(2003) dalam Meydianawathi (2007:135) tingkat keuntungan atau *Return On Asset* (ROA).

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan yang cukup besar, karena Bank Indonesia tidak lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM berubah menjadi tidak langsung (Setyobudi,2007:32-33). Walaupun peranan Bank Indonesia menjadi tidak langsung tetapi lebih menjadi lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan yang menunjang UMKM (Booklet Perbankan Indonesia,2008:69)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi di dalam hal memperoleh keputusan penyaluran kredit UMKM yang dapat diberikan suatu bank dalam menopang dan memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. Variabel-variabel tersebut dipisahkan kedalam dua kategori yaitu, variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal dalam penelitian ini menggunakan DPK, CAR, ROA dan NPL yang secara keseluruhan berasal dari dalam bank itu sendiri. Sementara variabel eksternal dalam penelitian ini menggunakan suku bunga SBI. SBI merupakan instrumen atas BI *rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penggunaan SBI sebagai variabel eksternal digunakan atas dasar dalam menentukan suku bunga kredit yang akan ditawarkan kepada masyarakat, hal lainnya bahwa bank-bank umum seringkali menempatkan dana nya pada SBI. Sehingga dapat dikatakan bahwa suku bunga SBI memiliki peran dalam penawaran kredit pada suatu bank.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menspesifikasikan masalah pokok penelitian dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel internal bank (DPK, CAR, ROA, NPL) terhadap penawaran kredit sektor UMKM?
2. Bagaimana pengaruh variabel eksternal bank (SBI) terhadap penawaran kredit sektor UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel internal bank (DPK, CAR, ROA, NPL) terhadap penawaran kredit bank di sektor UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel external bank (SBI) terhadap penawaran kredit bank di sektor UMKM

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan keputusan kredit di dalam perbankan, diantaranya :

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam mempelajari, membahas, dan memahami mengenai pembahasan yang sama. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan terutama di bidang perbankan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Signifikansi Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pendapat berupa uraian pembahasan dan saran yang layak dipertimbangkan oleh bank yang bersangkutan

1.5. Batasan Penelitian

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian, yang menjadi objek penelitian ialah bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2007-2008
2. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder bank umum yang diperoleh dari hasil publikasi Statistik Perbankan Indonesia serta kebijakan-kebijakan lainnya

3. Variabel internal di dalam penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Loan* (NPL) UMKM
4. Variabel eksternal di dalam penelitian ini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dianalisis, tujuan, signifikansi penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang teori yang terkait dengan penelitian ini, konstruksi model teoritis, model analisis, hipotesis yang digunakan, operasionalisasi variabel penelitian. Kemudian metode penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini seperti pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK UMUM

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pemaparan hasil temuan dan analisis mengenai pengolahan data terhadap variabel penelitian yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Bab ini merupakan penutup di mana penulis akan menarik kesimpulan dengan menganalisis pengaruh variabel terhadap penawaran kredit di bank umum berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan. Selain itu penulis juga memberikan beberapa saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.